



Pendampingan Implementasi Model Pembangunan Wilayah Berbasis Kawasan Strategis di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara

Kadir Sabilu¹, La Ode Alwi², Romy Ketjulan³, Waode Siti Anima Hisein⁴, Ruslaini⁵, Yusraini⁶,
Wellem H. Muskita⁷, La Ode Muh. Yasir Haya⁸

¹Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo; email: kadirabilu@uho.ac.id

²Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo; email: alwiode76@gmail.com

³Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo; email: romy.ketjulan@uho.ac.id

⁴Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo; email: animahisein@uho.ac.id

⁵Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo; email: ruslaini@uho.ac.id

⁶Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo; email: yusraini@uho.ac.id

⁷Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo; email: wellemhmuskita@uho.ac.id

⁸Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo; email: laode.haya@uho.ac.id

ABSTRACT

Mapping strategic areas based on comprehensive and detailed sub-districts according to the livelihood patterns of the community, leading commodities, distinctive characteristics of sites and geographical regions, availability of facilities, and institutions are required by the government to enhance economic growth and sustainable welfare improvement. The results of community service with the theme "Implementing a Region-Based Development Model" inform that, in general, Muna Regency has implemented a sectoral and regional approach to enhance the economic competitiveness of its community through the designation of 8 strategic areas based on sub-district regions, namely: urban strategic areas, coastal region strategic areas; integrated tourism strategic areas, integrated fisheries strategic areas, special economic zone strategic areas, transmigration area strategic plan, argopolitan strategic areas, and agro-marine strategic areas, as outlined in the national medium-term development plan (RPJMN) and the regional space order plan (RTRW), Muna Regency. Infrastructure and facility development such as road improvement and irrigation systems, rejuvenation of less productive plantation crops, agricultural land intensification, extensification and intensification of shrimp and fish ponds in integrated fisheries strategic areas and agro-marine areas, as well as the optimization of soil processing tools, are necessary for the optimization and effectiveness of the implemented development model program.

Keywords : Strategic Areas; Coastal; Sub-District; Agropolitan; Integrated Fisheries

ABSTRAK

Pemetaan kawasan strategis berbasis kecamatan yang komprehensif dan terperinci sesuai pola pencaharian masyarakat, komoditi unggulan, keunggulan karakteristik situs dan geografis wilayah, ketersediaan fasilitas dan kelembagaan diperlukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang berkelanjutan. Hasil pengabdian masyarakat dengan tema Pendampingan Implementasi Model Pembangunan Berbasis Kawasan Strategis menginformasikan bahwa secara umum Kabupaten Muna telah menerapkan pendekatan sektoral dan regional dalam meningkatkan daya saing ekonomi masyarakatnya, melalui penetapan 8 kawasan strategis berbasis wilayah kecamatan, yaitu: kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis wilayah pesisir; kawasan strategis pariwisata terpadu, kawasan strategis perikanan terpadu, kawasan strategis ekonomi khusus, kawasan strategis rencana kawasan transmigrasi, kawasan strategis argopolitan, dan kawasan strategis agromina-bahari, yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Muna. Pengembangan sarana dan prasarana seperti perbaikan akses jalan dan sistem irigasi, peremajaan tanaman perkebunan yang kurang produktif, intensifikasi lahan pertanian, ekstensifikasi dan intensifikasi tambak udang dan ikan di kawasan strategis perikanan terpadu dan agromina-bahari serta optimalisasi alat-alat pengolahan tanah diperlukan untuk optimalisasi dan efektifitas program model pembangunan yang dijalankan.

Kata Kunci : Kawasan Strategis; Pesisir; Kecamatan; Agropolitan; Perikanan Terpadu

Correspondence : Romy Ketjulan

Email : romy.ketjulan@uho.ac.id, no. kontak (+62 812-4541-3126)

• Received 03 Desember 2023 • Accepted 11 Desember 2023 • Published 12 Desember 2023

• e - ISSN : 2961-7200

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat [1]. Secara umum pengaturan kawasan strategis termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara kecamatan. Selain itu, penetapan kawasan strategis juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing. Terdapat beberapa faktor yang perlu ditingkatkan guna menunjang daya saing suatu kawasan, yaitu infrastruktur, inovasi, teknologi dan kompetensi tenaga kerja, promosi budaya serta promosi pariwisata [2,3].

Negara telah memberikan kewenangan pada daerah dalam penyelegaraan penataan ruang, bahwa untuk memperkuat ketahanan nasional yang sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kewenangan tersebut selanjutnya oleh daerah salah satunya ditafsirkan dengan mengidentifikasi kawasan strategis daerah sebagai upaya menjaga keserasian dan keterpaduan antar desa dan antara pusat dan daerah. Penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan [4,5].

Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa cakupan penting yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan berbasis kawasan strategis, yaitu: rumusan tujuan strategis dan kebijakan pengembangan wilayah di daerah; identifikasi potensi pengembangan berbagai komoditi unggulan berdasarkan kluster wilayah; Identifikasi komoditas potensial dan pola pertumbuhan ekonomi; Identifikasi ketersediaan fasilitas dan kelembagaan; Pengembangan basis data kewilayahan dan kompilasi peta-peta

eksisting; Analisis kewilayahan dan struktur perekonomian wilayah serta kajian keterkaitan antar wilayah; Pengembangan infrastruktur wilayah yang menunjang perekonomian; Perumusan rekomendasi KSK yang akan diprioritaskan berdasarkan analisis aspek fisik, ekonomi dan sosial budaya [6].

Penetapan kawasan strategis difokuskan pada percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, mengedepankan aspek pemerataan, dan pemanfaatan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah kecamatan. Dukungan sistem logistik, infrastruktur, kebijakan, peraturan, manajemen ruang dan wilayah, serta sistem transportasi perlu dipertimbangkan secara komprehensif, sehingga berdampak positif pada daya-saing kawasan strategis [7]. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah, termasuk pemerintah desa diperlukan dalam mewujudkan kebijakan yang tidak saling menghambat atau tumpang tindih. Ketersediaan infrastruktur dan konektivitas dalam sistem informasi maupun logistik menjadi salah satu pendukung utama dalam meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi di wilayah kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) [8].

Kabupaten Muna adalah sebuah pulau kecil yang merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki banyak potensi sumber daya alam, kekayaan budaya, dan memiliki keunikan geografis. Kondisi tersebut telah mempengaruhi dinamika sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Muna. Pemetaan kawasan strategis yang komprehensif dan terperinci diperlukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang berkelanjutan di Kabupaten Muna. Kabupaten Muna telah memiliki beberapa kawasan prioritas Nasional, meliputi: (1) Kawasan Pae-Wuna yaitu kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) yang meliputi wilayah Parigi-Kabawo; (2) Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang diberi nama Kawasan Mutiara (SK Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 104 Tahun 2017); (3)

Kawasan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020); (4) Kawasan perdesaan prioritas untuk desa-desa yang memiliki satu atau lebih kegiatan sistem produksi pertanian, perkebunan dan pengelolaan sumber daya alam; (5) Kawasan strategis bahari untuk pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap; (6) Kawasan prioritas pariwisata; (7) Kawasan pusat kerajinan tradisonal daerah; dan (8) Kawasan pusat kerajinan seperti meubel, yang menjadi sasaran pengembangan kawasan strategis.

Penetapan kawasan strategis Kabupaten (KSK) Muna difokuskan pada percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah-wilayah kecamatan, mengedepankan aspek pemerataan, pemanfaatan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah kecamatan. Untuk Kawasan Transmigrasi, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI menargetkan ke depan bahwa kawasan transmigrasi Muna Timur Raya (Mutiara) menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan baru untuk skala kabupaten maupun nasional [9]. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional dalam meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi di Kabupaten Muna. Tujuan kajian ini adalah untuk menelaah ketepatan penetapan kawasan strategis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang akan menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Muna.

METODE

Waktu pelaksanaan dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan pada bulan April-Agustus tahun 2021. Kegiatan Pendampingan Implementasi Model Pembangunan Berbasis Kawasan Strategis Kabupaten Muna ini dilaksanakan di delapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Muna, meliputi dua puluh dua wilayah kecamatan di Kabupaten Muna.

Tahapan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Muna dalam telaah kritis penetapan kawasan strategis berbasis keunggulan sumberdaya alam di tingkat kecamatan berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tahap kegiatan, sebagai berikut:

Tahap 1: Persiapan pelaksanaan kegiatan

Persiapan kegiatan mencakup persiapan administrasi dan persiapan teknis pelaksanaan pengabdian.

Tahap 2: Penentuan kriteria kawasan strategis

Kriteria kawasan strategis didapatkan dengan menggunakan Content Analysis terhadap hasil analisis dasar (sosial, ekonomi dan lingkungan), analisis kesesuaian tata ruang kawasan strategis, dokumen kebijakan dan tinjauan literatur. Hasil analisis dasar dan kesesuaian tata ruang didapatkan dari survey lapangan yang telah dilakukan di lokasi-lokasi kawasan strategis.

Kriteria berdasarkan Kebijakan

No	Kriteria KSK Eksisting	Kriteria KSK Potensi
1	Tercantum dalam RTRW Nasional	Tercantum dalam RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota/ terkait sebagai kawasan strategis
2	Tercantum dalam RPJP Nasional	Tercantum dalam RPJP Provinsi dan RPJP Kabupaten/Kota
3	Tercantum dalam kebijakan sektoral pada level Nasional	Tercantum dalam kebijakan sektoral pada Provinsi dan Kabupaten/Kota
4	Telah memiliki peraturan presiden	Telah memiliki RDTR dan PZ level provinsi atau Kabupaten/Kota
5	Arah pengembangan KSK telah sesuai dengan arahan kebijakan terkait	Arah pengembangan KSK telah sesuai dengan arahan kebijakan terkait

1. Kriteria berdasarkan Fisik Lingkungan

No	Kriteria KSK Eksisting	Kriteria KSK Potensi
1	Wilayah yang termasuk KSK memiliki administrasi dan luas yang jelas	Wilayah potensi kawasan strategis memiliki administrasi dan luas yang jelas
2	Memiliki kajian mitigasi bencana untuk wilayah yang termasuk dalam deliniasi KSK	Menyiapkan kajian mitigasi bencana untuk wilayah yang berpotensi termasuk dalam deliniasi kawasan strategis
3	Wilayah KSK memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Wilayah kawasan strategis menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2. Kriteria berdasarkan konektifitas ekonomi

No	Kriteria KSK Eksisting	Kriteria KSK Potensi
1	KSK memiliki potensi komoditi untuk kepentingan nasional	Wilayah potensi kawasan strategis telah memiliki aktivitas ekspor komoditas (ditunjukkan dalam PDRB)
2	KSK memiliki kontribusi ekonomi nasional (ditunjukkan dengan kontribusi PDRB secara nasional)	Aktivitas ekspor komoditas wilayah potensi kawasan strategis melibatkan wilayah sekitarnya
3	KSK memiliki kontribusi ekonomi regional (ditunjukkan dengan adanya hubungan supplydemand dengan provinsi lain)	Menyiapkan acuan atau prosedur dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk menghindari eksploitasi SDA
4	Memiliki acuan atau prosedur dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk menghindari eksploitasi SDA	

3. Kriteria berdasarkan aksesibilitas infrastruktur

No	Kriteria KSK Eksisting	Kriteria KSK Potensi
1	Wilayah KSK telah didukung dengan pelabuhan Daerah	Wilayah potensi kawasan strategis memiliki potensi pengembangan pelabuhan Daerah
2	Wilayah KSK telah	Wilayah potensi

	didukung dengan jaringan jalan nasional	kawasan strategis memiliki potensi pengembangan jalan nasional dan atau provinsi
3	Wilayah KSK telah didukung dengan sumber dan jaringan energi listrik	Wilayah potensi kawasan strategis memiliki jaringan telekomunikasi atau potensi jaringan
4	Wilayah KSK telah didukung dengan jaringan telekomunikasi	Wilayah potensi kawasan strategis memiliki potensi sumber energi

4. Kriteria berdasarkan sosial budaya

No	Kriteria KSK Eksisting	Kriteria KSK Potensi
1	Telah memiliki forum komunikasi atau koordinasi dengan masyarakat lokal (daerah) yang berada di dalam wilayah KSK maupun sekitarnya	Menyiapkan forum komunikasi antar pemerintah daerah dengan masyarakat setempat yang termasuk di wilayah KSK.
2	Telah memiliki forum komunikasi atau koordinasi dengan pemerintah setempat yang berada di dalam wilayah KSK	

5. Kriteria berdasarkan aksesibilitas infrastruktur

No	Kriteria KSK Eksisting	Kriteria KSK Potensi
1	Wilayah yang termasuk KSK telah memiliki kesepakatan dalam pengelolaan KSK	Menyiapkan kesepakatan kepala daerah dalam kawasan (MoU)
2	KSK telah memiliki kelembagaan pengelolaan kawasan	Menyiapkan dokumen pendukung untuk kelembagaan KSK
3	Kelembagaan KSK memiliki ketersediaan instrument/ dokumen pendukung (Data potensi, RDTR atau dokumen rencana terkait)	

Tahap 3: Survey lapangan

Survey dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi sosial, ekonomi, pertanian, lingkungan dan keunggulan spesifik di lokasi survey. Penelaahan berbasis ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dalam penentuan Kawasan Strategis kemudian dilanjutkan dengan pendalaman terhadap rencana rinci tata ruang kawasan strategis berdasarkan kriteria KSK. Selanjutnya adalah menentukan KSK dan merumuskan penanganan KSK yang akan diprioritaskan berdasarkan aspek fisik, ekonomi dan lingkungan.

Tahap 4: Focus Group Diskusi (FGD) awal, merupakan metode pengumpulan data kualitatif dan merumuskan kuesioner.



Gambar 1. Focus Group Diskusi (FGD) awal Kegiatan Pendampingan Implementasi Model Pembangunan Berbasis Kawasan Strategis di Kabupaten Muna

Tahap 5: Survey lapangan lanjutan, merupakan pelaksanaan survey pada lokasi yang belum dikunjungi.

Tahap 6: Focus Group Diskusi (FGD) lanjutan, merupakan kegiatan pembahasan hasil capaian kegiatan dan evaluasi.



Gambar 2. Focus Group Diskusi (FGD) untuk pembahasan hasil capaian dan evaluasi Kegiatan Pendampingan Implementasi Model Pembangunan Berbasis Kawasan Strategis di Kabupaten Muna

Tahap 7: Penetapan dokumen kawasan strategis berbasis keunggulan sumberdaya alam di tingkat kecamatan, se Kabupaten Muna.

HASIL

Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Muna

Kabupaten Muna merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II Sulawesi, termaksud di dalamnya Kabupaten Muna dengan Ibu Kotanya Raha. Kabupaten muna memiliki luas wilayah $\pm 2.057,69 \text{ km}^2$ atau 205,769 ha, merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah administrasi Kabupaten Muna memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Selat Spelman;
2. Sebelah Timur: Kabupaten Buton Utara;
3. Sebelah Selatan: Kabupaten Buton tengah;
4. Sebelah Barat: Muna Barat.

Berdasarkan jumlah Kecamatan, luas wilayah Kabupaten Muna ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Luas wilayah Kabupaten Muna berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas (Km ²)	%	Titik kordinat wilayah	
						Lintang Selatan (⁰ LS)	Bujur timur (⁰ BT)
1	Tongkuno	Wakuru	11	440,98	21,43	5,1420	122,5225
2	Tongkuno Selatan	Lawama	6	57,26	2,78	5,1812	122,5225
3	Parigi	Wasolangka	11	123,76	6,01	5,0806	122,4421
4	Bone	Bone Kancitala	5	130,09	6,32	5,1449	122,4568
5	Marobo	Marobo	5	41,37	2,01	5,1338	123,1338
6	Kabawo	Lasehao	11	204,94	9,96	5,1008	122,7458
7	Kabangka	Oensuli	9	97,62	4,74	4,5682	122,2321
8	Kontukowuna	Bahutara	6	70,56	3,43	4,5794	122,2987
9	Kontunaga	Liabalano	6	50,88	2,47	4,5193	122,3906
10	Watopute	Wali	8	100,12	4,87	4,5031	122,4108
11	Katobu	Raha	8	12,88	0,63	4,4947	122,4321
12	Lohia	Lohia	9	49,81	2,42	4,5437	122,4452
13	Duruka	Wapunto	7	11,52	0,56	4,8684	122,7385
14	Batalaiworu	Laiworu	4	22,71	1,10	4,4700	122,4400
15	Napabalano	Tampo	6	105,47	5,13	4,3763	122,4090
16	Lasalepa	Bonea	7	107,92	5,24	4,7447	122,7398
17	Towea	Moasi	5	29,02	1,41	4,5761	122,6978
18	Wakorsel	Pure	5	95	4,62	4,9012	122,8319
19	Pasir Putih	Pola	6	89,53	4,35	4,9850	122,8091
20	Pasi Kolaga	Lambelu	4	48,77	2,37	5,0378	122,7593
21	Maligano	Maligano	6	98,09	4,77	4,4299	122,5073
22	Batukara	Lanobake	4	69,39	3,37	4,4843	122,5160

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Muna

Penetapan kawasan strategis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)

Tabel 2. Penetapan wilayah kawasan strategis Kabupaten (KSK) Muna

No	Kawasan Strategis	Wilayah
1	Kawasan strategis perkotaan	Kecamatan Katobu, Kecamatan Batalaiworu, Kecamatan Duruka, Kecamatan Lasalepa
2	Kawasan strategis wilayah pesisir	Kecamatan Napabalano
3	Kawasan strategis pariwisata terpadu	Kecamatan Lohia, Kecamatan Kontunaga, Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Batukara, Kecamatan Towea
4	Kawasan strategis perikanan terpadu	Kecamatan Towea, Kecamatan Marobo, Kecamatan Kabawo, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Maligano
5	Kawasan strategis kawasan ekonomi khusus (KEK)	Kecamatan Maligano, Kecamatan Batukara, Kecamatan Pasikolaga, Kecamatan Pasir Putih, Kecamatan Napabalano
6	Kawasan strategis rencana kawasan transmigrasi	Kecamatan tongkuno, Kecamatan Tongkuno selatan
7	Kawasan Strategis Kawasan Perdesaan Agropolitan	Kecamatan Parigi, Kecamatan Kabawo
8.	Kawasan strategis agromina-bahari	Kecamatan Kabangka

PEMBAHASAN

Berdasarkan Atlas Ketahanan Pangan dan Kerentanan (FSVA) 2015, Kabupaten Muna diklasifikasikan sebagai daerah tidak aman pangan dengan tingkat prioritas kerentanan 3 yang berarti cenderung tinggi serta menempati peringkat 190 berdasarkan distribusi daerah tidak aman pangan di Indonesia. Satria et al., 2020 melaporkan bahwa indeks ketidakamanan pangan di Kabupaten Muna menunjukkan ada 4 desa (2,6%) yang termasuk dalam kategori ketidakamanan pangan (prioritas 1), 33 desa (21,7%) diklasifikasikan sebagai cukup rentan (prioritas 2), 94 desa (61,8%) termasuk dalam kategori cukup tahan (prioritas 3), dan 21 desa (13,8%) masuk ke dalam kategori keamanan pangan (prioritas 4). Desa-desa dengan status tidak aman pangan (prioritas 1) dan rentan sedang (prioritas 2) sebagian besar memiliki karakteristik kesejahteraan penduduk rendah, rasio penduduk non-kerja yang tinggi, rasio penduduk tanpa akses air bersih yang tinggi, dan rasio rumah tangga tanpa fasilitas pembuangan air limbah yang tinggi. Implementasi model pembangunan berbasis kawasan strategis kecamatan di Kabupaten Muna diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat posisi ketahanan pangan di Kabupaten Muna.

Bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan akan lahan bermukim mendorong terjadinya alih fungsi lahan [6]. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. dikelompokkan. Dilihat dari jumlah penduduknya, kota memiliki lima klasifikasi yang terbagi dalam: 1) Kota kecil: 20.000-50.000 jiwa; 2) Kota sedang: 50.000-100.000 jiwa; 3) Kota besar: 100.000-1.000.000 jiwa; 4) Kota metropolitan: 1 juta – 5 juta jiwa; 5) Kota Megapolitan: >5 juta jiwa (Kustiwan dkk., 2003). Berdasarkan kriteria ini, kota raha yang melingkupi wilayah kecamatan, katobu, batalaiworu, dan Lasalepa terkategori sebagai kota sedang. Kecamatan Katobu yang memiliki

jumlah Penduduk sebanyak 26.896 jiwa, Kecamatan Batalaiworu memiliki jumlah penduduk sebanyak 15.240 jiwa, Kecamatan Duruka memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.633 jiwa, Kecamatan Lasalepa memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.204 jiwa [10].

Kota Raha memiliki beberapa kawasan strategis yang didalamnya terdapat pelayanan perkotaan dengan skala pelayanan lokal, regional, propinsi dan skala kabupaten serta kawasan strategis kepentingan ekonomi dan sosial yang diarahkan dan diperuntukkan pada kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, meliputi: Sub Kawasan strategis pelabuhan terpadu, Sub Kawasan Strategis Wisata Waterfront City, Sub Kawasan strategis Wisata Kuliner, Sub Kawasan Strategis Wisata Permandian Mata Air Jompi (Gambar 3).



Gambar 3. Sub-kawasan strategis di Kawasan strategis perkotaan. A. Kawasan strategis pelabuhan terpadu; B. Pelabuhan fery lagasa kecamatan katobu; C. Kawasan waterfront city kota raha; D. Kawasan wisata kuliner by pass raha; E. Wisata permandian mata air jompi

Kawasan Strategis Pelabuhan Terpadu menempati lahan seluas 281,102 Ha. Pelabuhan Nusantara Raha terletak di Jalan By Pass Kecamatan Katobu memiliki peran strategis dalam perputaran ekonomi di kabupaten muna. mengakomodir kepentingan di sektor kepelabuhanan sebagai pintu keluar-masuk kapal-kapal barang dan penumpang antar pulau. Pengembangan kawasan ini diarahkan pada pengembangan kawasan pelabuhan yang berstandar nasional sehingga kawasan strategis pelabuhan terpadu dapat mengoptimalkan

fungsi sebagai pusat jasa kepelabuhanan. Selain Pelabuhan Nusantara Raha, juga ada Pelabuhan Fery Lagasa terletak di Lagasa Kecamatan Duruka. Pelabuhan Raha merupakan pelabuhan pengumpul yang memiliki peran penting sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian dan arus mobilitas masyarakat Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Aktivitas di Pelabuhan Raha ini didominasi oleh kegiatan arus naik turun penumpang dari dan ke Kendari serta Baubau yang dilayani oleh kapal Pelni, kapal perintis, dan kapal cepat.

Perbaikan sistem transportasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas [11]. Bukan hanya perbaikan jalan raya di darat, transportasi laut juga menjadi fasilitas penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Pelabuhan Lagasa merupakan jembatan transportasi yang menghubungkan lima daerah Kecamatan di Kabupaten Muna, yaitu: Kecamatan Pasir Putih, Wakorumba Selatan, Pasikolaga, Maligano dan Kecamatan Batukara. Keberadaan pelabuhan ini berperan dalam distribusi barang dari daratan pulau Buton ke pulau Muna, atau sebaliknya. Peran penting kawasan strategis ini terlihat dari jumlah kunjungan kapal dan jumlah penumpang yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sub Kawasan Strategis Wisata Waterfront City adalah kawasan wisata yang ada di tengah Kota Raha. Tempatnya berada di sekitar kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pasar Sentral Laino Raha serta Pelabuhan Laino. Waterfront City diproyeksi sebagai ruang publik bagi warga kota dengan mengusung konsep perahu purbakala seperti yang tertera pada dinding gua liangkobori. Wisata ini mengusung konsep wisata bahari yang ada di tengah kota yang mengintegrasikan berbagai spot-spot menarik di sepanjang pantai kawasan Kota Raha. Sub Kawasan strategis Wisata Kuliner adalah kawasan strategis kepentingan ekonomi dan sosial yang diarahkan dan diperuntukkan pada kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Kawasan strategis wisata Kuliner yang terletak di ruas Jalan kota Raha dan kawasan By Pass Raha sebagai pelataran bahari Kabupaten Muna yang ditunjang dengan keberadaan Masjid Terapung

(Masjid Al Markaz Al Munajat Raha) dan Lapak-Lapak yang diperuntukkan sebagai kawasan wisata kuliner. Keberadaan lapak-lapak jajanan kuliner lokal variatif yang memadati sejumlah ruas jalan Kota Raha memberi nilai positif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di sekitar kawasan Kota Raha. Sub kawasan strategis wisata permandian mata air jompi adalah mata air ini terletak di hutan jati Warangga Kecamatan Katobu. Kawasan strategis dikategorikan sebagai ruang terbuka hijau di tengah kota yang salah fungsinya mereduksi efek gas rumah kaca (GRK) di kawasan perkotaan [8,12]. Kejernihan air berwarna hijau toskanya membuat mata air ini sering dimanfaatkan warga lokal untuk berenang ataupun berwisata merasakan hawa sejuk khas dalam hutan.

Kawasan strategis wilayah pesisir pada dasarnya bukan semata-mata merupakan kawasan peralihan ekosistem daratan dan laut, namun sekaligus sebagai titik temu antara aktifitas ekonomi masyarakat berbasis daratan dan masyarakat yang hidup berbasis laut. Masyarakat dari pesisir laut mengalirkan berbagai sumberdaya laut untuk kemudian dialirkan ke daratan, sebaliknya dari masyarakat daratan membawa berbagai sumberdaya pegunungan sehingga terjadi pertukaran aliran barang yang disalurkan ke masyarakat laut. Tidak jarang budaya barang tukar barang, seperti: beras ditukar dengan ikan, masih sering ditemukan sebagai pola transaksi atau perilaku pasar untuk saling memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kawasan pesisir sejak dahulu kala secara global telah menjadi konsentrasi aktifitas perekonomian dan peradaban manusia. Penentuan Kecamatan Napabalano sebagai kawasan strategis pesisir di Kabupaten Muna, secara prinsip didasarkan oleh keberadaan pulau-pulau kecil sebagai desa yang secara administrasi masuk dalam wilayah kecamatan Napabalano. Akulturasi pemenuhan kebutuhan ekonomi yang didorong keberadaan pelabuhan fery penyebrangan muna-kendari yang terdapat di kecamatan Napabalano secara signifikan telah mendorong peningkatan arus keluar-masuk barang di kawasan strategis ini. Dalam kacamata ekonomi wilayah, berbagai kawasan pesisir yang

memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi disebut memiliki *locational rent* yang tinggi. Nilai ekonomi kawasan pesisir, selain ditentukan oleh *locational rent*, setidaknya juga mengandung tiga unsur *economic rent* lainnya, yakni: *ricardian rent*, *environmental rent* dan *social rent*. *Ricardian rent* adalah rent berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumberdaya yang dimiliki unruk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya untuk berbagai aktifitas budidaya (tambak), kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. *Environmental rent* kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, sedangkan *social rent* menyangkut manfaat kawasan pada berbagai fungsi sosial. Di dalam mekanisme pasar, pada umumnya hanya *locational* dan *ricardian rent* yang telah terinternalisasi di dalam struktur nilai pasar, akibatnya berbagai fungsi lingkungan dan sosial kawasan pesisir banyak mengalami degradasi dan tidak mendapatkan penilaian yang semestinya. Kawasan Strategis Wilayah Pesisir di Kabupaten Muna terletak di Kecamatan Napabalano. Luas wilayah Kecamatan Napabalano adalah 105,7 km² dengan jumlah penduduk 11.723 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk 0,81 %. Desa Tampo di Napabalano merupakan kawasan strategis yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan yang memberi kontrol kuat terhadap kestabilan dan keseimbangan lingkungan ekosistem-ekosistem pesisir. Kecamatan Napalano juga merupakan Kawasan strategis Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), merupakan kawasan strategis yang diperuntukkan sebagai kawasan yang mengakomodir seluruh proses pengiriman BBM ke SPBU yang berada di Kabupaten Muna.

Pengembangan objek wisata di Pulau Muna perlu mengedepankan konsep pengembangan ekowisata berbasis pesisir dan pulau-pulau kecil melalui percepatan pengelolaan objek wisata kategori sedang [8]. Penetapan kawasan strategis pariwisata terpadu meliputi Lohia, Kontunaga, Tongkuno, Kabangka, Batukara dan Towea. Pengembangan pariwisata

ini berkaitan dengan munculnya pemahaman dan kesadaran bahwa kabupaten muna memiliki cukup banyak potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata, khususnya pada ke enam wilayah kecamatan tersebut. Obyek wisata danau napabale, muara motonuno, liang kabori, pantai meleura, puncak mangkeluno, puncak kars masalili, telaga biru moko, pantai walengkabola, permandian fotuno sangia, air jatuh kalima-lima, pantai bungin pinungan, Pantai pandan, pantai torega yang tersebar di ke enam wilayah kecamatan tersebut, merupakan spot-spot wisata yang menawarkan keindahan panorama wilayah di Kabupaten Muna (Gambar 4).



Gambar 4. Beberapa spot wisata di kawasan strategis pariwisata terpadu Kabupaten Muna

Penetapan kawasan strategis perikanan terpadu di Kecamatan Towea, Kecamatan Marobo, Kecamatan Kabawo, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Maligano. Sektor perikanan memiliki andil cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Muna karena produksi komoditas perikanan (tangkap dan budidaya) cukup melimpah dengan tren yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Untuk produksi kegiatan budidaya ikan baik itu budidaya laut maupun budidaya payau, bisa diprediksi masih dibawah potensi yang ada dan diperkirakan masih kurang dari 50%. Produksi ikan bandeng kira-kira bisa mencapai angka 1.400 ton/tahun, udang vaname sekitar 800 ton/tahun, ikan kerapu sekitar 3 ton/tahun, udang lobster sekitar 0,5 ton/tahun, dan rumput laut mencapai angka 48.000 ton/tahun. tinggi. Kebiasaan akan makan ikan menjadikan ikan termasuk komoditas utama di Kabupaten Muna. Namun demikian, untuk ikan konsumsi tersebut dapat di katakan hampir 100%

masyarakat masih mengkonsumsi ikan hasil tangkapan dari laut. Terdapat juga ikan yang dibudidayakan seperti ikan bandeng, tetapi ikan bandeng akan dikonsumsi pada musim hasil tangkapan di laut sedikit. Program Jaman Sekolah (Jangan Menjual Sebelum Ikan Diolah), didorong untuk meningkatkan nilai ekonomi ikan yang ditangkap difokuskan di sentral produksi ikan tangkap di Kecamatan toewa.

Pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali sumberdaya alamnya termasuk sumberdaya tanah dan air untuk pengembangan pertanian [13]. Penetapan Kawasan Strategis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kecamatan Maligano, Batukara, Pasikolaga, Pasir putih, dan Napabalano. Keempat kematan ini memiliki komoditas unggulan yaitu Kawasan Komoditi Jagung dan Kawasan Komoditi Perikanan Terpadu. Disamping itu di kecamatan ini terdapat pula sub sektor unggulan, yaitu sub sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan telah berjalan dengan baik. Komoditas komoditas pertanian tanaman hortikultura sayuran yang memiliki nilai $LQ > 1$ adalah: tanaman cabai. sedangkan nilai $LQ < 1$ adalah tanaman tomat. Produk unggulan tanaman buah-buahan adalah pisang, dan tanaman perkebunan adalah kelapa dan mette (Gambar 5).



Gambar 5. Beberapa produk unggulan di Kawasan Stretegis Ekonomi khusus Kabupaten Muna

Penetapan kawasan strategis rencana kawasan transmigrasi di Kecamatan Tongkuno dan Tongkuno Selatan. Penetapan ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai daya dukung lingkungan, dengan tetap memperhatikan hak-hak lahan masyarakat

setempat, demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu. Pengembangan wilayah transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan sebagai kawasan perkotaan baru, sedangkan lokasi permukiman transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan untuk pembentukan wilayah perkotaan baru. Kondisi yang diharapkan setelah adanya kawasan transmigrasi Tongkuno Raya adalah: 1) Tersedianya sarana permukiman yang layak bagi masyarakat serta penambahan penduduk yang signifikan sehingga dapat mendinamisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi warga; 2) Tersedianya sarana pelayanan bagi kebutuhan dasar masyarakat secara memadai dan mudah dijangkau; 3) Terbukanya akses kawasan untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitarnya, melalui perbaikan infrastruktur yang memadai sehingga dapat menunjang percepatan pembangunan di semua sektor; 4) Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan mengoptimalkan potensi ekonomi dan sumberdaya yang ada di dalam kawasan terutama potensi pengembangan sektor perdagangan, pertanian dan perikanan.

Penetapan kawasan strategis perdesaan agropolitan kecamatan parigi dan kabawo. Kawasan strategis pedesaan agropolitan di Kabupaten Muna di kelompokkan menjadi tiga klaster, yaitu klaster jagung kuning dan kebun nanas, klaster padi serta klaster perikanan terpadu. Penentuan ini pada beberapa desa didasarkan pada kedekatan lokasi secara administrasi dan memiliki kesamaan potensi sumberdaya alam. Untuk klaster jagung kuning dan kebun nanas di Kecamatan Parigi Berada di desa warambe, kelurahan Walambenowite, desa Wapuale, desa Laiba, kelurahan Kolasa, kelurahan Kosundano, dan Desa Parigi. Sedangkan untuk klaster padi berada di desa Wakumoro, desa Latampu dan desa Labulu-bulu. Sementara untuk klaster perikanan terpadu berada di desa Wasolangka. Di Kecamatan Kabawo klaster jagung kuning dan kebun nanas terletak di desa Wantiworo, desa Kasaka, desa Lamaeo, desa Kontumere, desa

Kambawuna, desa Laimpi, dan desa Bea. Klaster padi terletak di desa Rangka dan desa Bente. Sedangkan Untuk Klaster perikanan terpadu ditetapkan di desa Kawite-wite dan desa Lamanu.

Percepatan pemanfaatan berbagai potensi setiap daerah di Muna sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan kemandirian daerah [14]. Penetapan Kawasan Strategis Agromina Bahari Kecamatan Kabangka. Agromina bahari di kecamatan kabangka merupakan kawasan yang diprioritaskan oleh pemerintah Kapupaten Muna sebagai pengembangan budidaya perikanan. Kawasan agromina bahari ini telah berhasil menjadi embrio munculnya kawasan industri perikanan budidaya baru dan berkembangnya perekonomian daerah. Agro mina bahari Kabangka yang sejak tahun 2015 telah diidentifikasi sebagai kawasan agrominabahari dengan kategori A bersama 15 Kabupaten lain di Seluruh Indonesia, akan terus didorong menjadi kawasan unggulan yang mandiri dan mampu menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing [15] dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muna.

SIMPULAN

Hasil pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan, beberapa hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerapkan penedekatan sektoral dan regional dalam meningkatkan daya saing ekonomi masyarakatnya, memiliki 8 kawasan strategis berbasis wilayah kecamatan, yaitu: kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis wilayah pesisir; kawasan strategis pariwisata terpadu, kawasan strategis perikanan terpadu, kawasan strategis ekonomi khusus, kawasan strategis rencana kawasan transmigrasi, kawasan strategis argopolitan, dan kawasan strategis agromina-bahari, yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Kabupaten Muna.
2. Untuk mendukung tercapainya pengembangan kawasan tersebut maka sangat

perlu diadakan kebutuhan sarana dan prasarana yang sangat prioritas di kawasan strategis tersebut, antara Lain: 1) pembangunan dan peningkatan akses Jalan yang menghubungkan antar desa di kawasan pengembangan wisata dan di kawasan transmigrasi. 2) Program peremajaan tanaman perkebunan yang kurang produktif; 3) Optimalisasi lahan pertanian melalui sistem intensifikasi lahan pertanian; 4) Optimalisasi alat-alat pertanian sesuai karakteristik kebutuhan kawasan strategis; 5) Program ekstensifikasi dan intensifikasi lahan tambak udang dan ikan di kawasan potensial strategis perikanan; 6) Pengadaan fasilitas dan akses pasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Muna yang telah mendanai pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada aparatatur pemerintah kecamatan di Kabupaten Muna dan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang. Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Vol. 60, 2020. 26AD. p. 67. [[Link](#)]
2. Lestari RB. Membangun Citra Sebuah Kota Dalam Persaingan Global Melalui City Branding. Jurnal Ilmiah STIE MDP. 2016;5(2):68–79. [[Google Scholar](#)]
3. Sabahan S, Yuliansyah Y. Kajian Daya Saing Sektor Pariwisata Kabupaten Sambas. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis. 2017;5(2):274–8. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Satria RK, Firdaus M, Pribadi DO, Munibah K. Village Level Food Insecurity Index and Regional Clustering in Muna District, Southeast Sulawesi Province, Indonesia. Geospatial Information. 2020;4(1). [[Google Scholar](#)]
5. Pontoh Nia K, Iwan K. Pengantar

- Perencanaan Perkotaan. Bandung: Penerbit ITB Bandung. 2009; [Google Scholar]
6. Aldiansyah S, Wibowo A. Aplikasi Metode Spatial Multi Criteria Analysis untuk Pengembangan Kawasan Permukiman (Studi Kasus: Re-Evaluasi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara). Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan (JGEL). 2022;6(2):136–52. [View at Publisher] [Google Scholar]
7. Rahmawati A, Ansari MI, Parawangi A. Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP). 2020;1(1):218–31. [View at Publisher] [Google Scholar]
8. Surur F, Cahya ZN, Wahid MS. Urgensi pengembangan wisata dalam perencanaan wilayah di Pulau Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Akuatikis: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2019;3(2):41–7. [View at Publisher] [Google Scholar]
9. Sainu MA. Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Potensi Wisata Alam di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. IPB University; 2020. [View at Publisher] [Google Scholar]
10. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna. Kabupaten Muna dalam Angka. Desember 2020. 2021. [Link]
11. Alstadt B, Weisbrod G, Cutler D. Relationship of transportation access and connectivity to local economic outcomes: Statistical analysis. Transportation Research Record. 2012;2297(1):154–62. [View at Publisher] [Google Scholar]
12. Winarso H. Metropolitan di Indonesia: kenyataan dan tantangan dalam penataan ruang. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum; 2006. [View at Publisher] [Google Scholar]
13. Djaenudin D, Sulaeman Y, Abdurachman d A. Pendekatan pewilayahan komoditas pertanian menurut pedo-agroklimat di kawasan timur Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian. 2002;21(1):1–10. [Google Scholar]
14. Ndahali H. Kajian Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2000-2014 di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Universitas Gadjah Mada; 2016. [View at Publisher] [Google Scholar]
15. Hadie LE, Kusnendar E, Priono B, Dewi RRSPS, Hadie W. Strategi dan kebijakan produksi pada budidaya ikan nila berdaya saing. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia. 2018;10(2):75–85. [View at Publisher] [Google Scholar]